PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 1 No. 2, Juli (2021)
e-ISSN: 2797-0469

KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANG UNAN JALAN NASIONAL DI KABUPATEN ENDE

Maria Lidia Tai
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ml3837839@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende, serta apa saja factor-faktor pendukung dan penghambat dalam koordinasi ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memerlukan informan sebanyak 6 orang. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende belum sepenuhnya efektif dikarenakan terhalang oleh masalah jaringan di Kabupaten Ende yang masih terlihat tidak cukup baik sehingga informasi yang dibutuhkan cukup terlambat. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sadar betapa pentingnnya koordinasi, dan koordinasi sangatlah penting antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar proses pembangunan jalan nasional dikabupaten Ende dapat berjalan dengan maksimal.

Kata kunci : *Koordinasi, Pembangunan Jalan* Nasional

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka kegiatan pembangunan memegang peranan penting bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sejalan dengan petumbuhan dan pengembangan pembangunan nasional di era globalisasi ini, perkembangan pembangunan di Kota Ende juga berkembang pesat, salah satunya di bidang infrastruktur jalan. Dalam penelitian ini, jalan yang dimaksud adalah jalan nasional yaitu jalan yang meghubungkan antara Kabupaten Ende dengan Kabupaten Nangakeo dan Kabupaten Ende dengan Kabupaten Sikka. Dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende, hingga saat ini terlihat beberapa perubahan yang sudah dibuat disepanjang Jalan Nasional di Kabupaten Ende, meskipun beberapa masih terlihat kerusakan dan sempitnya jalan pada bagian Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka. Dalam pembangunan jalan nasional ini, tenu adanya koordinasi pihak-pihak yang berkaitan dalam pembangunan. Dalam hal ini yaitu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi adalah suatu proses dimana pemimpin mengembangkan pola usaha

kelompok secara teratur diantara unit-unit dibawahnya dan menjamin kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan para kelompok pejabat menjadi serasi, seirama dan terpadu.

Dalam pencapaian tujuan dalam pelaksanaan pembangunan jalan nasional, masalah yang dihadapi satker pelaksanaan jalan nasional adalah miskoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengakibatkan beberapa proyek tidak berjalan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan sehingga tidak berjalan dengan efektif. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik meneliti tentang " Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Jalan Nasional di Kabupaten Ende "

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut Satori dan Komariah (2011:23): Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, gambar- gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT. Subyek dalam penelitian ini yaitu kepala Satker dan beberapa pegawai yang berada di Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT. Dalam penelitian ini data dilakukan dengan pengamatan, wawancara yang dilakukan dengan pegawai serta dokumentasi yang didapat dari hasil wawancaratersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Ende merupakan Kabupaten yang berada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia dengan luas Kabupaten 2.046,50 km² dan populasi 270.207 jiwa. Ibu kota Kabupaten ini adalah Kabupaten Ende. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT atau yang disingkat Satker ini merupakan Kantor dibawah Naungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kementrian PUPR dengan bersumber dana APBN yang ditempatkan di Kota Ende.

Luas wilayah jalan nasional yang dikerjakan oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasioal dengan ruas 547, 11 km yang meliputi wilayah dari Gako-Aegela, Aegela-Batas Kota Ende-Wolowaru, Wolowaru-Batas Kota Maumere, Maumere-Waerunu, Waerunu-Larantuka, Larantuka-Balaorin. Kabupaten Ende sendiri memliki ruas jalan nasional 8.565 m, yang meliputi wilayah Ende-Wolowaru.

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan JalanNasional di Kabupaten Ende

Dalam koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangnan jalan nasional di Kabupaten Ende, dapat dijelaskan dengan indicator koordinasi yaitu Komunikasi, Kompetensi, Partisipan, Kesepakatan (komitmen) dan kuantuitinitas perencanaan. Komunikasi adalah bagiamana dalam hal menunjang koordinasi yang baik adalah perlu adanya koordinasi yang baik sehingga koordinasi

berjalan lancer serta menunjang berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan jalannasional di Kabupaten Ende.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Satker Bapak Sutrisno terkait komunikasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam pembangunan jalan yaitu komunikasi yang dijalankan dengan bagian daerah berjalan dengan cukup baik. Koordinasi yang dibuat sesuai dengan standar operasional (SOP) yang merekamiliki.

Untuk komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah Kabupaten Ende sejauh ini cukup baik karena adanya komunikasi langsung. tetapi karena sudah 1 tahun belakangan adanya pandemic komunikasi tetap berjalan tetapi menggunakan via telephone ataupun media sosial seperti zoom dan WA. Sehingga dalam pertemuan jika terdapat pelebaran ataupun kerusakan diekitaran jalan nasional, satker ini juga berhak dalam pemeliharaan itu dan tentu ada komunikasi antara satker dengan pemerintah daerah.

Komunikasi ini tidak secara langsung harus via zoom apalagi saat pandemic seperti ini. Dan masalah yang terjadi dalam komunikasi ini ada pada jaringan ataupun koneksi internet sehingga tidak terlalu bagus. Tetapi komunikasi tetap berjalan dengan baiik. dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu dalam berkoordinasi sangatlah penting, baik komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi dalam hal berkomunikasi dengan bagian pusat, kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT berjalan cukup baik walaupun kendala jaringan tetapi tidak menghambat komunikasi di antara mereka.

Kompetensi Partisipan adalah keterlibatan pihak-pihak yang berwenang dan mengawasi jalannya koordinasi dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende yaitu bagian pusat kemetrian PUPR, balai yang menaungi satker dan bagian daerah sebagai pemilik lahan yang akan dibangun Jalan Nasional di Kabupaten Ende.Dari hasil wawancara dengan Bapak Rusdy selaku Pelaksana Administrasi.

Keterlibatan dalam pembangunan ini sangat penting. Contohnya terjadi kerusakan atau bencana yang terjadi disekitaran jalan nasional maka Satker akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Ende dalam penerbitan surat pernyataan Bupati serta adanya dokumenasi sebagai bukti bencana tersebut, sehingga satker merencakan penanganan dan memperkirakan kebutuhan biaya yang akan dikeluarkan.

Beberapa bulan sebelumnya Kasatker juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemasangan lampu jalan disekitar Jalan Gatot Subroto dan itu mendapat persetujuan dari pemerintah daerahnya juga. bahwa keterlibatan pemerintah dalam pembangunan jalan nasional ini di Nilai cukup baik. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah melakukan koordinasi dalam pemenuhan fasilitas sehingga disepanjang badan jalan nasional sudah disiapkan pengaman jalan dan lampu-lampu penerang disetiap wilayah jalan nasional bagian perbatasan yang diadakan dibagian satker.

Kesepakatan dan komitmen adalah bentuk kesepakatan dan sanksi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Kesepakatan dan komitmen dalam pembangunan jalan nasional ini tentu ada, sehingga pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende dapat berjalan dengan

Efektif. Dalam pembangunan jalan nasional ini tentu adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Satker dengan pemerintah daerah itu sendiri. Seperti jika terjadi kerusakan pada jalan nasonal dan butuhya pelebaran di jalan nasional tetap adanya pernyatan dari pemerintah daerah kepada satker untuk memlihara jalan ersebut dan ketika kami mnegerjakan proyek tersebut komitmen kami mengerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah kami buat dan dana yang kami keluarkan merupakan dari dana APBN.

Kontinuitas Perencanaan adalah umpan balik dan perubahan yang dilakukan antara Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat terkait kerjasama dalam pembangunan Jalan Nasional di Kabupaten Ende.

Koordinasi Satker dalam perencanaan yang berkelanjutan akan memililki hasil yang baik, perencanaan yang berkelanjutan dari hasil kesepakatan dalam upaya pembangunan jalan nasional mampu dijalankan dengan koordinasi yang efektif.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Irma, terkait Perncanaan yang berkelanjutan tentu ada dalam pembangunan jalan nasional ini. Dan perencanaan ini sudah diepakati oleh pemerintah usat dan pemerintah Daerah. Seperti adanya bencana alam seperti tanah longsor, itu merupakan perencanaan jangka panjang yang harus dilakukan Satker ini dalam hal rehabilitasi, rekomendasi, rekontruksi semuanya itu dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Juga.

Segala bentuk kontinuitas perencanaan sangat diperlukan, mengingat hasil jangka panjang yang diharapakan oleh semua pihak, jika program jangka pendek saja yang berjalan maka tidak akan menghasilkan nilai yang positif hanya sekedar saat itu saja, jadi sangat diperlukan perencanaan lanjutam untuk menunjang segala aspek program pembangunan jalan nasional di wilayah Kabupaten

Faktor Pendukung dan Penghambat Kordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Jalan Nasional diKaupaten Ende

Adapun factor pendukung dan penghambat dalam koordinasi ini yaitu Dalam koordinasi dengan pemerintah pusat faktor pendukung dalam hal ini yaitu komunikasi yang baik dan lancar dalam hal ini komunikasinya secara langsung. karena dengan komunikasi yang lancar maka koordinasi yang kita lakukan itu akan sesuai harapan dan juga faktor pendukungnya seperti adanya sosial media sebagai alat komunikasi yang efektif.

Faktor penghambat yang dialami satker dalam koordinasi dengan pemerintah daerah untuk sekarang selama masa pandemic ini kebanyakan komunikasi yang dilakukan melalui zoom. Di daerah kabupaten Ende ini, terhambat oleh jaringan sehingga pada saat zoom suara yang dikeluarkan tidak cukup jelas.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelesan sebelumnya bahwa dalam koordinasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende ini berjalan dengan cukup baik sehingga pembangunan Jalan nasional serta masalah- masalahnya dilakukan dengan efektif.

Adapun faktor pendukung dan penghambat koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende yaitu

faktor pendukungnya seperti adanya sosial media sebagai alat komunikasi yang efektif serta aktor penghambat yaitu kondisi jaringan yang tidak cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adianto. (2019, 8 21). Pengertian Jalan Menurut Undang-undang. Retrieved 2 12, 2021,from paralegal.id:

Irmadiana. (2020, 11 23). Pengertian Koordinasi Tujuaa, Jenis dan Ruanag Lingkup. Retrieved 4 15, 2021, from accurate.id:https://acurate.co.id

Kais, A. (2020, 5 28). Satker PJN IV siap Benahi Jalan Nasional di Kota Ende. Retrieved 3 19, 2021, from regional.flores: http://regional.flreseditorial.com

Moekijat, D. (1994). Koordinasi (SuatuTinjauan Teoritis). Bandung: 1994.

Putri, N. (2016). Koordinaasi Dalam Pemelihraan Jalan Nasional di Kota Pekan Baru. Administrasi Publik, 1-9.

Tegila, R. (208). Perananan Camat Sebagai Koordinator Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bolangilang Kabupaten Bolang. Jurnal Eksekutif, 41-56.

Welly. (2018). Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Seacara Partisipatif di Desa Manuar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kuti Timur. IlmuPemerintahan, 50-63.